

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Bamus Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam telah melaksanakan suatu pengawasan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal itu sesuai dengan Pasal 58 dengan menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kabupaten Agam Pasal 57 ayat (1) tentang Pemerintahan Nagari, Bamus Nagari mempunyai tugas dan wewenang, Bamus Nagari membahas Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari serta Peraturan Wali Nagari, Mengusulkan pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari, Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Menyusun Tata Tertib Nagari.
2. Kendala Yang Dihadapi Bamus Nagari Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam adalah adanya perbedaan pemahaman dan pelaksanaan peraturan tentang pengelolaan anggaran. Dengan terhambatnya pengelolaan anggaran tersebut terjadi keterbatasan dan keterhambatan kinerja Bamus Nagari dalam melaksanakan tugas serta pernah terjadi kesalahpahaman antara Wali Nagari dan Bamus Nagari

B. Saran

1. Dalam penelitian ini terlihat bahwa Bamus Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, diharapkan Bamus Nagari lebih bertanggungjawab pada jabatannya, sehingga fungsi Kelembagaan Nagari dapat dijalankan dengan efektif dan proses penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik, serta dapat memperbaiki citra Bamus Nagari selama ini, yang hanya sebagai lembaga pelengkap Pemerintahan Nagari. Agar ada tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Bamus Nagari, supaya kasus pelanggaran tidak terjadi. Seperti meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Nagari.
2. Agar Wali Nagari tidak berjalan sendiri dalam menyelenggarakan Pemerintahan, harus ada keharmonisan dan keselarasan serta koordinasi antar lembaga Nagari, khususnya terhadap Bamus Nagari dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, hal ini dapat dibina dengan melakukan kegiatan bersama yang melibatkan semua unsur Pemerintahan Nagari.
3. Untuk pihak Pemerintah Kabupaten Agam agar lebih memperhatikan dana alokasi untuk Bamus Nagari, karena dana yang sekarang ini dirasakan amat kurang untuk melaksanakan berbagai kegiatan Bamus Nagari.